PADAIDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN 3048-1821 (Online - Elektronik)
Vol. 3 No 2 Juli-Desember 2026
Publisher: P3M Politeknik Pariwisata Makassar
Available online:
http://journal.poltekparmakassar.ac.id/index.php/padaidi

Tata Kelola Wilayah Pesisir Melalui Pendampingan Masyarakat: Penguatan Hospitaliti Digital dan Pengembangan Paket Perjalanan Wisata Berbasis Potensi Lokal di Desa Buntu Matabing, Kabupaten Luwu.

Atriana Djabbar[1*] Daniel Adolf Ohyver [2]
[12]Politeknik Pariwisata Makassar, Jl. Gn. Rinjani Jl. Metro Tj. Bunga No.1, Tj. Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224

[*]Corresponding Author: atriana@poltekparmakassar.ac.id*

Received: 06 Oktober	Accepted: 7 November 2026	Published: 13 November 2026

Abstract

Coastal areas in developing countries often possess significant potential for community-based tourism development, yet they frequently suffer from fragmented management, lack of local empowerment, and environmental degradation. This paper examines the transformation of coastal tourism governance through participatory community facilitation in Buntu Matabing Village, Luwu Regency, South Sulawesi, Indonesia. Using a qualitative framework grounded in the Sustainable Livelihood Approach (SLA) and Community-Based Coastal Resource Management (CBCRM), data were gathered through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs), participatory observation, and document analysis. The initiative focused on capacity-building workshops, eco-tourism training, local narrative/storytelling integration, and coastal waste management awareness. A key structural outcome of this intervention was the establishment of the local tourism awareness group, Pokdarwis "Matabing Bahari", which institutionalized local leadership and inclusive governance. Findings reveal a shift in community perception from viewing coastal resources merely for immediate economic exploitation to recognizing them as a collective, sustainable socio-ecological ecosystem. Despite structural challenges such as limited physical infrastructure, social resistance, and elite capture risks, adaptive strategies—including pentahelix collaboration, intergenerational dialogue, and participatory monitoring—proved effective. This study provides empirical evidence on how integrating local cultural values and community-led governance enhances community resilience and offers a scalable model for sustainable coastal tourism in regional developing contexts.

Keywords: *digital hospitality, tourism travel business, coastal tourism packages, community-based tourism, tourism awareness group.*

Abstrak

Wilayah pesisir di negara berkembang memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas, namun sering kali terkendala oleh tata kelola yang terfragmentasi, minimnya pemberdayaan masyarakat, dan degradasi lingkungan. Makalah ini mengkaji transformasi tata kelola pariwisata pesisir melalui pendampingan masyarakat secara partisipatif di Desa Buntu Matabing, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif yang dilandasi oleh Sustainable Livelihood Approach (SLA) dan Community-Based Coastal Resource Management (CBCRM), data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, dan studi dokumen. Kegiatan pendampingan berfokus pada pelatihan kapasitas teknis, tata kelola ekowisata, pengembangan narasi budaya (storytelling), serta kesadaran pengelolaan sampah pesisir. Hasil utama dari intervensi ini adalah terbentuknya kelembagaan lokal Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Matabing Bahari" sebagai wadah kepemimpinan lokal dan tata kelola yang inklusif. Temuan lapangan menunjukkan adanya pergeseran persepsi masyarakat, dari yang semula melihat sumber daya pesisir hanya untuk eksploitasi ekonomi

langsung menjadi kesadaran akan ekosistem sosio-ekologis yang berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur fisik, resistensi sosial, dan potensi dominasi elit, strategi adaptif seperti kolaborasi pentahelix, dialog intergenerasi, dan pemantauan partisipatif terbukti efektif. Studi ini memberikan bukti empiris mengenai pentingnya integrasi nilai budaya lokal dalam memperkuat ketahanan komunitas serta menawarkan model tata kelola pesisir berkelanjutan yang dapat direplikasi.
Kata Kunci: hospitaliti digital, perjalanan wisata, paket wisata pesisir, pariwisata berbasis masyarakat, pokdarwis.

1. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata. Keberadaan sumber daya alam berupa pantai, ekosistem laut, serta kekayaan budaya masyarakat pesisir menjadi modal penting dalam menciptakan destinasi wisata yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memperkuat identitas lokal. Namun, pengembangan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata tidak hanya membutuhkan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga memerlukan tata kelola yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang tepat, aktivitas pariwisata di kawasan pesisir berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti degradasi lingkungan, meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam, serta rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi wisata pesisir yang sangat besar, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Akan tetapi, berbagai kawasan pesisir masih menghadapi tantangan dalam proses pengembangannya menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas masyarakat lokal dalam memahami tata kelola destinasi, pengembangan produk wisata, pelayanan wisatawan, serta pengelolaan lingkungan pesisir. Dalam konteks pengelolaan destinasi wisata, keberhasilan suatu kawasan tidak hanya ditentukan oleh daya tarik wisata, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek aksesibilitas, amenitas, promosi, dan tata kelola yang dikenal sebagai konsep 5A dalam pengembangan pariwisata (Ridwan, n.d.). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi faktor penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan pariwisata, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi.

Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Kawasan ini memiliki sumber daya alam pesisir dan potensi budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam aspek tata kelola dan kesiapan masyarakat. Berdasarkan kondisi awal, masyarakat masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan destinasi wisata secara terpadu, sementara pengalaman wisata yang ditawarkan kepada pengunjung juga belum berkembang secara maksimal. Wisatawan belum memperoleh pengalaman yang lebih bermakna karena belum tersedia narasi interpretatif mengenai potensi lokal, layanan berbasis keramahan masyarakat, serta konsep pengalaman wisata yang mampu mengangkat nilai budaya dan lingkungan setempat.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wisata pesisir di Desa Buntu Matabing membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan destinasi. Pendekatan berbasis masyarakat (community-based tourism) menjadi salah satu strategi yang relevan karena mampu meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya lokal sekaligus memperkuat keberlanjutan destinasi. Dalam pengelolaan wilayah pesisir, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan, pengalaman, dan hubungan sosial yang erat

dengan lingkungan pesisir. Menurut Anuar et al. (2025), pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wisata pesisir perlu diarahkan pada peningkatan kesadaran lingkungan, pengelolaan sampah, serta pengurangan dampak negatif aktivitas wisata terhadap ekosistem pesisir.

Selain itu, konsep tata kelola wilayah pesisir yang berkelanjutan menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan Integra*ted Coastal Zone Management (ICZM)* memandang kawasan pesisir sebagai ruang yang harus dikelola secara terpadu dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan (UNEP, 2021). Oleh karena itu, kegiatan pendampingan masyarakat diperlukan untuk membangun kapasitas lokal, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta mendorong munculnya inisiatif wisata yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan sebagai bentuk intervensi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Buntu Matabing dalam mengelola potensi wisata pesisir secara berkelanjutan. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses edukasi, pelatihan, pengembangan narasi lokal sebagai atraksi wisata, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pendampingan penyusunan paket wisata berbasis potensi lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola destinasi, memperkuat kelembagaan lokal, serta menciptakan model pengembangan wisata pesisir yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan nilai budaya masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan PkM ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat Desa Buntu Matabing dalam membangun tata kelola wisata pesisir berbasis komunitas melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan pengembangan potensi wisata yang berkelanjutan. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi praktis dalam pengembangan desa wisata pesisir serta menjadi model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan pada kawasan pesisir lainnya.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa Buntu Matabing dalam mengelola potensi wilayah pesisir sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena pengembangan wisata pesisir tidak hanya membutuhkan intervensi teknis, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pemilik sumber daya lokal. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses identifikasi permasalahan, penyusunan solusi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pendampingan.

Lokasi pelaksanaan kegiatan berada di Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat lokal yang memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah pesisir, meliputi kelompok nelayan, pemuda desa, kelompok masyarakat, tokoh adat, serta pemerintah desa. Pelibatan berbagai kelompok masyarakat dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengembangan wisata pesisir berbasis komunitas. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu tahap identifikasi kondisi awal, tahap pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat, serta tahap evaluasi dan refleksi kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menunjukkan adanya perubahan positif dalam pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir sebagai destinasi wisata berbasis komunitas. Kegiatan pendampingan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi potensi lokal, memahami konsep tata kelola wisata berkelanjutan, serta terlibat secara langsung dalam merancang strategi pengembangan destinasi.

1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Masyarakat Pesisir

Hasil observasi awal dan diskusi bersama masyarakat menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Buntu Matabing memiliki keterkaitan yang kuat dengan sumber daya pesisir, khususnya pada sektor perikanan dan aktivitas ekonomi lokal. Namun, pemanfaatan wilayah pesisir selama ini masih lebih banyak berorientasi pada fungsi ekonomi langsung, seperti lokasi mencari ikan, tempat tambatan perahu, dan aktivitas budidaya, sementara potensi kawasan tersebut sebagai destinasi wisata belum sepenuhnya dikembangkan.

Hasil wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD*) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang cukup kuat mengenai lingkungan pesisir, termasuk tradisi, nilai budaya, serta praktik masyarakat dalam berinteraksi dengan laut. Akan tetapi, pengetahuan tersebut belum terintegrasi dalam konsep pengelolaan wisata yang terencana. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa nilai budaya, cerita lokal, dan karakteristik lingkungan dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi.

Selain aspek pengelolaan wisata, kegiatan identifikasi juga menemukan adanya permasalahan lingkungan, terutama terkait keberadaan sampah plastik di kawasan pesisir. Sebelum dilakukan pendampingan, sebagian masyarakat masih memandang sampah pesisir sebagai bagian dari kondisi alam sekitar dan belum melihatnya sebagai permasalahan yang membutuhkan pengelolaan bersama. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam kegiatan edukasi lingkungan.

2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Edukasi dan Pelatihan Pariwisata

Salah satu hasil utama kegiatan PkM adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pengelolaan wisata berbasis komunitas. Kegiatan pelatihan yang diberikan mencakup tata kelola atraksi wisata bahari, pengembangan cerita lokal sebagai elemen wisata *(local storytelling)*, pengelolaan lingkungan pesisir, serta penyusunan konsep paket wisata berbasis potensi masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat mulai memahami bahwa pengembangan destinasi wisata tidak hanya bergantung pada keindahan alam, tetapi juga membutuhkan kemampuan dalam menciptakan pengalaman wisata yang menarik bagi pengunjung. Masyarakat mulai menggali kembali berbagai potensi budaya lokal yang sebelumnya belum dikemas sebagai produk wisata, seperti cerita sejarah masyarakat, tradisi lokal, serta aktivitas kehidupan pesisir.

Respons masyarakat terhadap kegiatan pendampingan menunjukkan antusiasme yang positif. Peserta yang terdiri dari pemuda, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya mulai memberikan berbagai gagasan mengenai pengembangan daya tarik wisata, termasuk pengembangan tradisi lokal dan aktivitas masyarakat pesisir sebagai bagian dari pengalaman wisata.

3. Pembentukan Kelembagaan Lokal melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Salah satu capaian penting dari kegiatan PkM adalah terbentuknya kelembagaan masyarakat berupa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Matabing Bahari”. Pembentukan kelompok ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem pengelolaan wisata berbasis masyarakat di Desa Buntu Matabing.

Pokdarwis “Matabing Bahari” dibentuk sebagai wadah masyarakat untuk mengorganisasi berbagai aktivitas pengembangan wisata, mulai dari perencanaan atraksi, pengelolaan kegiatan

wisata, hingga koordinasi dengan pihak pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Pembentukan kelembagaan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa pengelolaan destinasi wisata membutuhkan organisasi lokal yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.

Dalam tahap awal pengembangannya, Pokdarwis telah mulai menyusun berbagai gagasan pengembangan paket wisata, seperti penentuan rute wisata, pengemasan aktivitas wisata bahari, pengembangan kuliner lokal, serta penerapan prinsip konservasi lingkungan dalam aktivitas wisata.

4. Pengembangan Konsep Wisata Berbasis Potensi Lokal dan Budaya

Kegiatan pendampingan juga menghasilkan penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengangkat nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas destinasi wisata. Melalui proses diskusi dan eksplorasi bersama masyarakat, berbagai cerita lokal, tradisi, dan nilai budaya mulai diidentifikasi sebagai potensi atraksi wisata.

Salah satu hasil yang terlihat adalah munculnya kesadaran masyarakat bahwa kawasan pesisir tidak hanya memiliki fungsi ekonomi sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga memiliki nilai budaya dan sosial yang dapat menjadi daya tarik wisata. Hal ini terlihat dari perubahan perspektif masyarakat yang mulai melihat bahwa pantai dapat memberikan manfaat ekonomi melalui aktivitas wisata, bukan hanya melalui aktivitas perikanan. Laporan PKM Pak Dan Atr Fixed

Selain itu, tradisi lokal seperti mappatabe yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat sebelum melaut mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari narasi wisata budaya. Penggalian nilai budaya tersebut menjadi salah satu bentuk pengembangan wisata berbasis identitas lokal (place-based tourism).

5. Peningkatan Kesadaran Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Melalui edukasi mengenai dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut, masyarakat mulai memahami bahwa keberlanjutan destinasi wisata sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang terjaga.

Perubahan tersebut terlihat dari munculnya inisiatif masyarakat untuk melakukan kegiatan bersih pantai secara mandiri serta merancang penggunaan tempat sampah berbahan ramah lingkungan. Pendekatan edukasi yang dilakukan secara partisipatif dan menggunakan konteks lokal terbukti mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan konservasi lingkungan.

6. Dampak Kegiatan terhadap Tata Kelola Wisata Pesisir

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini memberikan dampak terhadap perubahan cara pandang masyarakat dalam melihat potensi wilayah pesisir. Masyarakat yang sebelumnya lebih memandang wilayah pesisir sebagai sumber ekonomi langsung mulai memahami pentingnya pengelolaan secara kolektif dan berkelanjutan.

Pendampingan yang dilakukan telah mendorong masyarakat untuk bertransformasi dari penerima manfaat menjadi pelaku utama dalam pengembangan destinasi. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan wisata, pembentukan kelembagaan lokal, pengembangan atraksi berbasis budaya, serta kegiatan konservasi lingkungan.

Dengan demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan berkelanjutan dapat menjadi strategi efektif dalam membangun tata kelola wisata pesisir berbasis komunitas. Model ini tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

3.2 Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Buntu Matabing menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata pesisir tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan pembangunan fisik, tetapi membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan kawasan. Temuan kegiatan memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki

potensi sosial, budaya, dan ekologis yang besar, namun masih membutuhkan pendampingan untuk mengubah potensi tersebut menjadi sumber daya pariwisata yang memiliki nilai ekonomi dan keberlanjutan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan pengembangan wisata berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memahami tata kelola destinasi, membangun kelembagaan lokal, serta mengelola sumber daya secara kolektif.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam kegiatan ini sejalan dengan konsep *Community-Based Tourism (CBT)* yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam proses pengembangan pariwisata. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari aktivitas wisata, tetapi memiliki peran dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan wisata. Hasil kegiatan di Desa Buntu Matabing menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat, dari yang sebelumnya melihat wilayah pesisir hanya sebagai ruang ekonomi berbasis perikanan menjadi ruang yang memiliki potensi ekonomi alternatif melalui pengembangan wisata. Perubahan perspektif ini menjadi indikator awal keberhasilan proses pemberdayaan karena masyarakat mulai memahami hubungan antara konservasi lingkungan, budaya lokal, dan peluang ekonomi wisata.

Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tata kelola wisata, pengembangan storytelling lokal, serta penyusunan konsep paket wisata menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan merupakan aspek penting dalam pembangunan destinasi berbasis komunitas. Kondisi awal masyarakat yang belum memahami aspek pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, dan pengemasan pengalaman wisata menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan kawasan pesisir. Oleh karena itu, proses pendampingan tidak hanya diarahkan pada transfer pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan.

Pendampingan masyarakat bukan sekadar proses penyampaian informasi atau pelatihan teknis, tetapi merupakan proses kolaboratif yang bertujuan membangun kapasitas, kepemimpinan lokal, dan kelembagaan masyarakat. Dalam konteks Desa Buntu Matabing, proses pendampingan telah mendorong munculnya inisiatif masyarakat melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Matabing Bahari”. Pembentukan kelembagaan tersebut menjadi salah satu capaian penting karena menunjukkan adanya proses transformasi masyarakat dari kelompok penerima program menjadi kelompok pengelola yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi.

Pembentukan Pokdarwis juga memperlihatkan pentingnya aspek kelembagaan dalam tata kelola wisata pesisir. Suatu destinasi wisata tidak dapat berkembang secara optimal apabila tidak memiliki struktur pengelolaan yang jelas. Dalam perspektif tata kelola wilayah pesisir, keberadaan kelembagaan lokal menjadi faktor penting untuk membangun koordinasi antaraktor, mendistribusikan peran masyarakat, serta menjaga keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan konsep *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola kawasan pesisir secara terpadu (UNEP, 2021).

Selain aspek kelembagaan, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran strategis dalam membangun identitas destinasi wisata. Penggalian cerita masyarakat, tradisi lokal, serta praktik budaya pesisir menjadi dasar dalam pengembangan local storytelling sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pendekatan ini penting karena wisata modern tidak hanya bergantung pada daya tarik visual suatu tempat, tetapi juga pada kemampuan destinasi memberikan pengalaman yang memiliki makna bagi wisatawan. Narasi lokal mampu memperkuat sense of place dan membangun hubungan emosional antara wisatawan dengan destinasi. Dalam konteks Desa Buntu Matabing, pengembangan narasi budaya menjadi strategi untuk membedakan destinasi tersebut dari kawasan wisata pesisir lainnya.

Dari perspektif keberlanjutan, kegiatan PkM ini juga menunjukkan bahwa pengembangan wisata pesisir harus berjalan seimbang dengan upaya konservasi lingkungan. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah keberadaan sampah plastik di kawasan pesisir yang sebelumnya belum sepenuhnya dipahami sebagai ancaman terhadap ekosistem laut. Melalui proses edukasi dan diskusi partisipatif, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan kawasan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi lingkungan yang berbasis konteks lokal lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat instruksional. (Anuar et al., 2025) bahwa pendidikan lingkungan, pengelolaan sampah, dan keterlibatan masyarakat merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola wisata pesisir yang bertanggung jawab.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan *Sustainable Livelihood Approach* (SLA), kegiatan ini memberikan penguatan terhadap beberapa modal kehidupan masyarakat (livelihood capitals). Pada aspek human capital, pelatihan dan pendampingan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan wisata dan pelayanan wisatawan. Pada aspek social capital, pembentukan Pokdarwis memperkuat jaringan sosial dan kerja sama masyarakat. Sementara itu, pada aspek natural capital, kegiatan ini mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga sumber daya pesisir sebagai aset utama pariwisata. Pendekatan SLA menegaskan bahwa keberlanjutan masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengelola berbagai modal yang dimiliki secara adaptif.

Selanjutnya, kegiatan ini juga relevan dengan konsep *Community-Based Coastal Resource Management* (CBCRM) yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola utama sumber daya pesisir. Masyarakat Desa Buntu Matabing memiliki pengetahuan lokal mengenai lingkungan laut dan budaya pesisir yang dapat menjadi dasar dalam pengelolaan wisata berkelanjutan. Melalui pendekatan CBCRM, pengetahuan lokal tersebut tidak hanya dipertahankan sebagai tradisi, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari strategi pengelolaan destinasi. Hal ini sejalan dengan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat akan lebih efektif ketika masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan bahwa pengembangan wisata pesisir masih menghadapi beberapa tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur, kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan, serta perlunya dukungan dari berbagai pihak. Keterbatasan akses, fasilitas pendukung wisata, dan sumber daya pengelola menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam tahap pengembangan berikutnya. Oleh karena itu, keberlanjutan program membutuhkan kolaborasi multipihak antara masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta melalui pendekatan pentahelix.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa pendampingan masyarakat mampu menjadi strategi efektif dalam membangun fondasi tata kelola wisata pesisir berbasis komunitas. Keberhasilan program tidak hanya terlihat dari terbentuknya kelembagaan lokal, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola potensi pesisir secara berkelanjutan. Model pendampingan yang diterapkan di Desa Buntu Matabing dapat menjadi contoh pengembangan desa wisata pesisir lainnya yang mengintegrasikan aspek ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka pembangunan pariwisata berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Tata Kelola Wilayah Pesisir Melalui Pendampingan Masyarakat di Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan” telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengelola potensi wilayah pesisir sebagai destinasi wisata berbasis komunitas. Pendekatan pendampingan yang dilakukan melalui edukasi, pelatihan, diskusi

kelompok, serta keterlibatan aktif masyarakat mampu mendorong perubahan pemahaman masyarakat dari yang sebelumnya melihat wilayah pesisir sebagai sumber ekonomi utama berbasis perikanan menjadi aset yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Buntu Matabing memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata pesisir. Melalui proses pendampingan, masyarakat mulai mampu mengidentifikasi potensi lokal, mengembangkan narasi budaya sebagai bagian dari pengalaman wisata, serta memahami pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Selain itu, terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Matabing Bahari" menjadi salah satu capaian penting sebagai bentuk penguatan kelembagaan lokal dalam mendukung pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam membangun rasa kepemilikan *(sense of ownership)* masyarakat terhadap pengembangan wilayahnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan gagasan wisata memberikan dasar yang lebih kuat bagi keberlanjutan program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Community-Based Coastal Resource Management (CBCRM) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir (Daly, 2022).

Meskipun demikian, pengembangan wisata pesisir Desa Buntu Matabing masih memerlukan dukungan lanjutan, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas pengelola, penyediaan infrastruktur pendukung, penguatan promosi destinasi, serta kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor terkait. Oleh karena itu, keberlanjutan hasil kegiatan membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan agar kelembagaan masyarakat yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi pengelola destinasi wisata yang mandiri dan adaptif.

Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan partisipatif dapat menjadi pendekatan strategis dalam membangun tata kelola wisata pesisir yang berkelanjutan. Model yang diterapkan di Desa Buntu Matabing dapat menjadi contoh pengembangan desa wisata pesisir lainnya dengan mengintegrasikan potensi alam, nilai budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan prinsip konservasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anuar, S. T., Mohd Ali, A. A., Cordova, M. R., & Charoenpong, C. (2025). Editorial: Baselines, impacts and mitigation strategies for plastic debris and microplastic pollution in South East Asia. In Frontiers in Marine Science (Vol. 12). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1586080

Ayyam, V., Palanivel, S., Chandrakasan, S., Ayyam, V., Palanivel, S., & Chandrakasan, S. (2019). Strategies and Collaborations for Management of Coastal Areas. Coastal Ecosystems of the Tropics-Adaptive Management, 261–286.

Braun, V., Clarke, V., & Hayfield, N. (2022). 'A starting point for your journey, not a map': Nikki Hayfield in conversation with Virginia Braun and Victoria Clarke about thematic analysis. Qualitative Research in Psychology, 19(2), 424–445.

Cuesta, J., Devereux, S., Abdulai, A., Gupte, J., Ragno, L. P., Roelen, K., Sabates-Wheeler, R., & Spadafora, T. (2021). Urban social assistance: Evidence, challenges and the way forward, with application to Ghana. Development Policy Review, 39(3), 360–380.

Daly, J. C. (2022). Key principles for effective marine governance, including lessons learned after decades of adaptive management in the Great Barrier Reef. Frontiers in Marine Science, 9, 972228.

Drake, A. K., Perkovic, A., Reeve, C., Alexander, S. M., Nguyen, V. M., & Dunmall, K. M. (2022). Community participation in coastal and marine research and monitoring in Inuit Nunangat: A scoping literature review. Facets.

Goldner, L., & Ben-Eliyahu, A. (2021). Unpacking community-based youth mentoring relationships: An integrative review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(11), 5666.

Grimm, K. E., Archibald, J. L., Bonilla-Anariba, S. E., Bood, N., & Canty, S. W. J. (2023). Framework for fostering just and equitable seagrass policy, management, and social-ecological outcomes: Lessons learned from Belizean marine resource managers. Marine Policy, 152, 105606.

Harvey, N., & Hilton, M. (2006). Coastal management in the Asia-Pacific region. In Global change and integrated coastal management: The Asia-Pacific region (pp. 39–66). Springer.

Hasim, H. (2021). Mangrove ecosystem, seagrass, coral reef: Its role in self-purification and carrying capacity in coastal areas. International Journal Papier Advance and Scientific Review, 2(1), 37–49.

Hsu, K., & Peng, L.-P. (2023). Understanding vulnerability and sustainable livelihood factors from coastal residents in Taiwan. Marine Policy, 155, 105793.

Jantanukul, W. (2024). Empowering Communities through Lifelong Learning: A Case Study of University Initiatives for Social Engagement and Personal Development. Journal of Education and Learning Reviews, 1(3), 45–58.

Jennings, V., San Antonio, K. M., Brown, M. J., Choice, L., Simpson, Q., Ford, I., Cho, H. J., Solis, P., Lacey, A., & Robinson, D. (2024). Place-Based Conservation in Coastal and Marine Ecosystems: The Importance of Engagement with Underrepresented Communities. Sustainability, 16(22), 9965.

Katti, S. W. B., & Mokodompit, E. A. (2025). Persepsi Masyarakat Lokal terhadap Pengembangan Potensi Wilayah Pesisir untuk Meningkatkan Ekonomi. Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH), 7(1), 120–129.

Kogachi, A., & Shaw, R. (2023). Application of Sustainable Livelihood Approach (SLA) to address climate-induced risks through the lens of Africa borderland. Climate, 11(3), 65.

Krishna, L. K. R., Hamid, N. A. B. A., Phua, G. L. G., Mason, S., Hill, R., Lim, C., Ong, S. Y. K., Ong, E. K., & Ibrahim, H. (2024). Peer mentorship and professional identity formation: an ecological systems perspective. BMC Medical Education, 24(1), 1007.

Mishra, K. (2022). Viability of community participation in coastal conservation: A critical analysis. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1095(1), 12009.

Padambo, M. R., Kawung, G. M. V, & Rompas, W. F. I. (2021). Analisis Pengaruh Petumbuhan Ekonomi Inflasi Dan Indeks Pebangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(5).

Ridwan, M. (n.d.). Sustainable Infrastructure Investment for Enhancing MICE Tourism Competitiveness in Jeneponto Regency. In Indonesian Annual Conference Series (Vol. 3).

Sakti, W. I. (2023). Peran Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir. Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT), 1, 87–90.

Schwermer, H., Barz, F., & Zablotski, Y. (2020). A literature review on stakeholder participation in coastal and marine fisheries. YOUMARES 9-The Oceans: Our Research, Our Future: Proceedings of the 2018 Conference for YOUng MArine RESearcher in Oldenburg, Germany, 21–43.

Tambe, S. (2022). Sustainable livelihoods approach. In Teaching and learning rural livelihoods: A guide for educators, students, and practitioners (pp. 45–56). Springer.

UNEP, D. (2021). Partnership and United Nations Environment Programme (2021). Reducing Consumer Food Waste Using Green and Digital Technologies,(1-96).

Vitkienė, E. (2014). LONG-TERM PRINCIPLE CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COASTAL ZONE MANAGEMENT. Regional Formation and Development Studies, 8(3), 257–264.

Yıldırım, İ., & Tekeli, E. K. (2023). The Role of Ecotourism in Sustainable Development. In Inclusive Community Development Through Tourism and Hospitality Practices (pp. 250–272). IGI Global.

Zhang, J., Chen, S., Cheng, C., Liu, Y., & Jennerjahn, T. C. (2023). Citizen science to support coastal research and management: Insights from a seagrass monitoring case study in Hainan, China. Ocean & Coastal Management, 231, 106403.